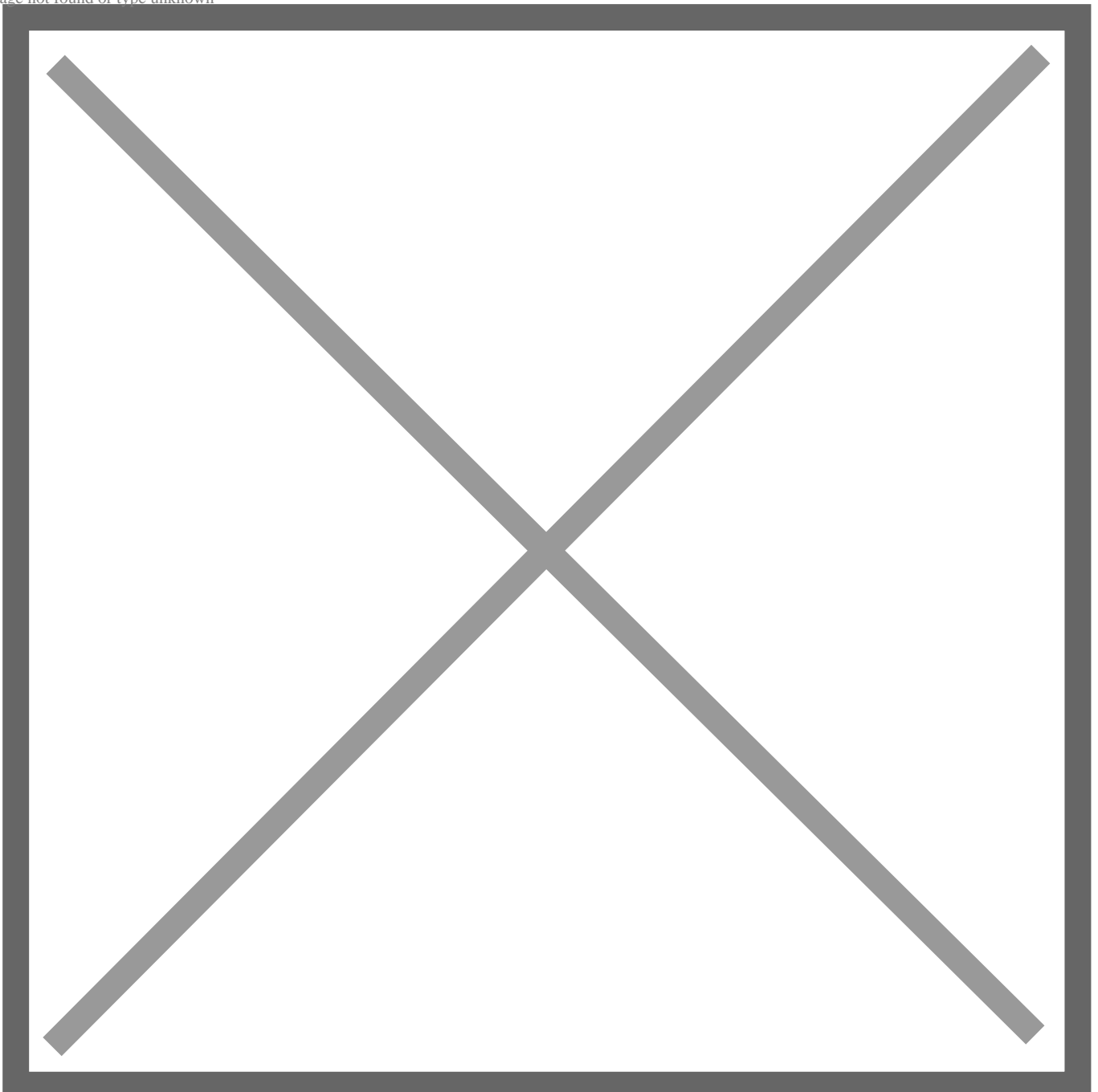


Ace Hasan Syadzily: Dari Akademisi Hingga Gubernur Lemhannas

Updates. - [WARTAWAN.ORG](https://wartawan.org)

Sep 19, 2025 - 12:15

Image not found or type unknown



POLITISI - Memasuki babak baru dalam kariernya, Ace Hasan Syadzily kini resmi mengemban amanah sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sejak 22 Oktober 2024. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menandai puncak perjalanan seorang akademisi dan politikus yang telah malang melintang di kancah nasional. Lahir pada 19 September 1976, Ace Hasan Syadzily merupakan sosok yang dikenal tak hanya karena kecemerlangan intelektualnya, tetapi juga ketajaman orientasi politiknya.

Sebelum menempati posisi strategis di Lemhannas, Ace Hasan Syadzily telah menorehkan jejak yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia pertama kali menduduki kursi parlemen mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II sejak tahun 2019. Pengalamannya di Senayan tidak berhenti di situ. Sebelumnya, ia juga pernah dilantik melalui mekanisme pergantian antarwaktu untuk mengisi sisa masa jabatan 2014–2019, menggantikan Andika Hazrumy yang kala itu memutuskan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Banten. Bahkan, jauh sebelumnya, pada tahun 2013, Ace Hasan Syadzily juga telah merasakan atmosfer parlemen melalui jalur pergantian antarwaktu.

Perjalanan Ace Hasan Syadzily di dunia politik tak lepas dari kedekatannya dengan Partai Golongan Karya (Golkar), partai yang telah ia ikuti sejak tahun 2004. Kepemimpinannya di tingkat Jawa Barat menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan kontribusinya dalam partai berlambang beringin ini. Pada tahun 2023, namanya sempat disebut-sebut berpotensi mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pasca mundurnya Zainudin Amali. Banyak pakar menilai peluangnya cukup terbuka, mengingat posisi tersebut kerap diisi oleh kader Golkar. Namun, pada akhirnya, Presiden Joko Widodo melantik Dito Ariotedjo untuk jabatan tersebut.

Kisah Ace Hasan Syadzily berakar dari lingkungan keluarga yang kental dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Ia adalah putra dari Kyai Haji Tubagus Achmad Rafe'i Ali bin Tubagus Ali Akbar, seorang ulama kharismatik dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nizhomiyyah di Labuan, Pandeglang, Banten. Ibunya, Siti Sutihat, turut menempa karakternya. Jejak sang ayah tak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga merambah dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah–Gotong Royong Kabupaten Lebak mewakili Golkar. Keterikatan darahnya dengan Kesultanan Banten, sebagai keturunan kesembilan Sultan Ageng Tirtayasa, semakin memperkaya identitasnya.

Meskipun dibesarkan dalam nuansa religius, Ace Hasan Syadzily menempuh pendidikan formal di sekolah umum. Perjalanan akademisnya dimulai dari SD Negeri 1 Labuan, Pandeglang (1982-1988), berlanjut ke SMP Islam Cipasung, Tasikmalaya (lulus 1991), dan Madrasah Aliyah di Sukamanah, Tasikmalaya (lulus 1994). Ia kemudian melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, mengambil Fakultas Adab dan Humaniora, meraih gelar sarjana pada tahun 2001. Tak berhenti di situ, semangat intelektualnya membawanya mendalami Antropologi di Universitas Indonesia (2001–2004) dan Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (2011–2014).

Lingkungan kampus menjadi arena Ace Hasan Syadzily pertama kali merasakan

denyut dunia politik. Berbagai organisasi kemahasiswaan ia ikuti, termasuk menjadi bagian dari senat mahasiswa dan memimpin badan eksekutif mahasiswa di kampusnya. Keterlibatannya dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (1997-1998) mengasah jiwa organisasinya. Sebagai aktivis, ia tak luput dari gelombang aksi demonstrasi pada Mei 1998 yang menjadi tonggak sejarah perubahan bangsa.

Karier Ace Hasan Syadzily mulai menanjak saat ia memimpin Indonesian Institute for Civil Society (2000-2008). Pasca meraih gelar sarjana, ia berkontribusi sebagai dosen tetap di IAIN Syarif Hidayatullah (2003). Di ranah organisasi kemasyarakatan, ia pernah dipercaya memimpin Gerakan Pemuda Ansor dan Majelis Dakwah Islamiah (2010–2015). Dunia politik praktis ia jelajahi sebagai staf ahli anggota DPR (2009–2012) dan staf khusus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga 2013. Di tahun yang sama, ia menjejakkan kaki di DPR RI melalui pergantian antarwaktu, menggantikan Mamat Rahayu Abdullah yang berpindah partai, yang mengharuskannya mundur dari jabatannya di Wantimpres.

Selain kiprahnya di lembaga legislatif, Ace Hasan Syadzily juga aktif sebagai dosen pascasarjana Magister Administrasi Publik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (hingga 2018) dan terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2014–2019). Pengalaman ini kian memperkaya pemahamannya tentang dinamika masyarakat dan pemerintahan.

Terinspirasi oleh jejak politik ayahnya, Ace Hasan Syadzily bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2004. Di partai ini, ia aktif dalam sayap partai seperti Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2010–2015), serta Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) untuk periode yang sama. Upayanya mencalonkan diri sebagai calon legislatif memang belum membuahkan hasil di awal, namun takdir membawanya ke Senayan melalui mekanisme pergantian antarwaktu pada 2013.

Dalam Prahalara Pemilihan Presiden 2014, Ace Hasan Syadzily menunjukkan sikap politiknya yang berbeda dari garis partai, ia secara terbuka mendukung Joko Widodo, sementara Golkar berlabuh pada koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Meski demikian, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2017 melalui pergantian antarwaktu menggantikan Andika Hazrumy. Peran strategisnya di DPP Golkar terus menguat, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2016–2017) dan kemudian Ketua DPP (hingga 2019) yang membidangi Media dan Penggalangan Opini.

Kiprahnya sebagai legislator berlanjut gemilang pada pemilihan legislatif 2019. Kali ini, ia memilih daerah pemilihan Jawa Barat II dan berhasil meraih kursi parlemen tanpa melalui pergantian antarwaktu, sekaligus menyumbang dua kursi bagi Golkar di dapil tersebut. Dedikasinya pada partai semakin terlihat saat ia ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kerohanian DPP Partai Golkar (2019–2024). Perjalanan kepemimpinannya di Golkar Jawa Barat pun tak kalah menonjol. Setelah sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada Februari 2021 menggantikan posisi yang kosong akibat tersandung kasus korupsi, Ace Hasan Syadzily kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada Februari 2022, dan dilantik langsung oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto pada 3 Juni 2022 di Bogor. Setelah Bahlil

Lahadahlia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 21 Agustus, Ace Hasan kembali masuk dalam kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Umum periode 2024-2029.

Atas dedikasi dan kontribusinya, Ace Hasan Syadzily telah menerima berbagai penghargaan prestisius. Pada tahun 2020, ia dianugerahi Obsession Awards kategori 'Best Parliamentarians' dari Obsession Media Group (OMG). Di tahun 2023, ia kembali menerima penghargaan Detik Jabar Awards sebagai figur teladan dalam kategori Pengembangan Bidang Sosial dan Agama.

Salah satu momen yang cukup menjadi sorotan publik adalah ketika Ace Hasan Syadzily meminta film 'His Only Son' dilarang tayang di Indonesia. Pernyataan ini muncul karena kekhawatiran Ace bahwa film tersebut dapat menyesatkan umat Islam. Namun, dalam klarifikasinya, ia menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut disampaikan dalam konteks tanya jawab di sebuah acara diskusi, dan ia tidak bermaksud melarang film tersebut ditonton oleh umat agama tertentu.

Karya-karya tulis Ace Hasan Syadzily juga mencerminkan kedalaman pemikirannya dalam berbagai isu. Beberapa di antaranya adalah 'Mencari Akar Kulturas Civil Society di Indonesia' (2003), 'Civil Society dan Demokrasi, Survey Tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta' (2003), 'Arifin Ilham: Dai Kota Penabur Kedamaian Jiwa' (2005), 'Keniscayaan Globalisasi Nasib Civil Society' (2005), dan 'Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia' (2019). ([PERS](#))